ADA 8 SISWA YANG IJAZAHNYA DITAHAN, YANG BELUM KETAHUAN LEBIH BANYAK

Minggu, 10 Juni 2018 - Haikal Akbar

Harianjogja.com, BANTUL-Kasus penahanan ijazah masih terjadi di Kabupaten Bantul, meski kepala daerah Kabupaten Bantul maupun provinsi berkali-kali mengimbau agar sekolah tidak menahan ijazah hanya karena orang tua siswa tidak mampu membayar.

Komunitas Perempuan Peduli Pelayanan Publik Bantul, Sudarsih mengatakan ada delapan siswa di Bantul yang ijazahnya ditahan sekolah. Namun, yang akan ia dampingi untuk ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY sebagai perwakilan sebanyak dua orang. Ia meyakini masih banyak siswa lainnya di Bantul yang ijazahnya ditahan.

"Delapan anak ini yang kami temukan langsung di lapangan. Yang belum ketahuan banyak," ujar dia, Sabtu (9/6/2018).

Sementara itu Ketua ORI DIY, Budhi Masthuri mengatakan masih akan mendalami laporan terkait penahanan ijazah tersebut. Saat ini pihaknya juga tengah memantau proses pembagian rapor. Ia mengimbau sekolah tidak menahan rapor dan ijazah siswa yang belum melunasi kewajiban administrasi keuangannya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan kepatutan dan bertentangan dengan Perda DIY Nomor 10/2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan.

"Rapor dan ijazah adalah dokumen negara yang menjadi hak siswa atas pendidikannya. Bukan barang jaminan untuk melunasi utang. Sekolah bisa menggunakan instrumen lain untuk memastikan orang tua siswa memenuhi kewajiban administrasi keuangannya," kata Budhi.

Jika orang tua siswa memang tidak mampu, kata Budhi, maka negara atau pemerintah kabupaten harus mengambilalih penyelesaiannya.